

# Tantangan Politik di Indonesia Tahun 2024: Membangun Kepemimpinan Pendidikan Islam

Sihono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

## ABSTRACT

**Purpose** – This research aims to present a new perspective on understanding Islamic educational leadership in a dynamic political era, focusing on the political challenges faced by Indonesia in 2024 and how Islamic leadership can anticipate and respond to these challenges.

**Method** – The research method employs a literature review with a critical analysis approach, with data collected from sources such as books, articles, previous studies, and relevant documents.

**Findings** – The research findings identify two main challenges faced by Indonesia in 2024: political polarization and the spread of hoaxes and hate speech. The phenomenon of political polarization involves division among pluralist and Islamic groups, while hoaxes and hate speech affect the integrity and the democratic process. The discussion highlights the importance of effective Islamic educational leadership in addressing these political challenges by reinforcing moderate and tolerant Islamic values and instilling critical thinking skills and digital literacy in the younger generation.

**Research Implications** – The implications of this research underscore the need for Islamic educational leaders who can adapt to the dynamics of politics and society and play a crucial role in shaping a generation capable of critical thinking and facing contemporary challenges wisely.

 OPEN ACCESS

## ARTICLE HISTORY

Received: 25-03-2024

Revised: 30-04-2024

Accepted: 30-04-2024

## KEYWORDS

leadership, islamic  
leadership education,  
political challenges

## Corresponding Author:

Sihono

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [sihono393@gmail.com](mailto:sihono393@gmail.com)

## Pendahuluan

Kepemimpinan pendidikan Islam tetap kuat dan relevan seiring dengan perubahan zaman. Pendidikan Islam akan terus memainkan peran krusial dalam mengarahkan individu menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (Mauludah, Ma'sum, and Iswanto 2023). Di tengah laju perkembangan zaman, pendidikan Islam tetap menjadi penjaga dari pengaruh negatif yang mengancam umat manusia. Era modernitas, dengan segala kemudahan akses informasi melalui internet, membawa risiko adanya pengaruh yang merugikan (Dinarti, Salsabila, and Herlambang 2024). Maka dari itu, kepemimpinan pendidikan Islam penting dalam melindungi individu dari ancaman ekstrimisme dan radikalisme serta mencegah penyerapan nilai-nilai negatif yang tersebar salah satunya dalam bidang politik (Zahra Hana Fadhilah 2021).

Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan yang besar sejalan dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang. Pendidikan Islam menjadi pondasi kunci dalam membentuk kepribadian individu agar memiliki orientasi yang terdefinisi dengan jelas. Peran sentral pendidikan Islam termanifestasi dalam membentuk karakter seseorang dalam interaksi, perilaku, tindakan, dan pemikiran. Kehadiran seorang pemimpin dalam pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan arahan agar proses pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif (Jhuji 2020).

Pendidikan Islam telah menjadi bagian *integral* dari kehidupan masyarakat Indonesia (Akip and Azwar 2022). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah dihadapkan pada berbagai tantangan politik yang mempengaruhi dinamika pendidikan Islam (Barokah et al. 2022). Dalam konteks ini, peran kepemimpinan pendidikan Islam menjadi sangat krusial dalam mengantisipasi dan mengatasi tantangan tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa *gap* penelitian yang perlu diisi, terutama dalam hal bagaimana kepemimpinan pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia (Mu'minah, Namiroh, and Malihah 2023). Keterbatasan penelitian sebelumnya dalam tema ini mengindikasikan perlunya pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mengantisipasi tantangan politik di masa depan.

Membangun kepemimpinan pendidikan Islam menjadi suatu keharusan dalam menanggapi perubahan politik yang terjadi. Tantangan politik, baik dari segi regulasi maupun opini publik, dapat memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan dan praktik pendidikan Islam. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan Islam perlu memperkuat komitmen untuk menjaga integritas, keadilan, dan inklusivitas dalam menjalankan tugas mereka (Zulkifli 2018).

Kepemimpinan Pendidikan Islam dalam ranah politik di Indonesia menghadapi tantangan yang terus berkembang, baik dari segi peraturan maupun harapan masyarakat, yang mendorong perlunya perluasan peran dan tanggung jawab

kepemimpinan pendidikan Islam. Pada tahun 2024, di tengah kompleksitas politik yang semakin meningkat, terutama dalam menghadapi tantangan politik yang berkaitan dengan pemilu sebagai wujud demokrasi terbesar. Tantangan tersebut mencakup isu politik identitas, penyebaran berita palsu, dan penyebaran ujaran kebencian (Melalusa Suthira 2023).

Menghadapi tantangan politik di Indonesia, kepemimpinan pendidikan Islam tidak hanya diuji dalam kemampuan mengelola institusi pendidikan, tetapi juga dalam kepekaan terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang. Kepemimpinan yang efektif dalam konteks ini memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam yang inklusif, serta kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pembangunan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan responsif (Khaldun et al. 2023).

Tahun 2024 menandai periode krusial bagi Indonesia, dengan dinamika politik yang semakin memanas menjelang pemilihan umum. Di tengah pergolakan ini, pendidikan Islam menjadi fokus utama. Kepemimpinan pendidikan Islam menjadi kunci untuk memastikan peran strategis pendidikan ini dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di era politik yang penuh gejolak (Hidayat 2023).

Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek pedagogis dan moral kepemimpinan pendidikan Islam (Maghfiroh, Dwi Lestari, and IAIN Salatiga Korespondensi 2022). Namun di era politik yang kompleks ini, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, yang mempertimbangkan konteks politik dan dampaknya pada pendidikan Islam. Penelitian sebelumnya juga belum menyelidiki secara mendalam bagaimana kepemimpinan pendidikan Islam dapat mengantisipasi dan merespons tantangan politik yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam pemahaman kepemimpinan pendidikan Islam di era politik yang dinamis. Jurnal ini akan mengkaji tantangan politik di tahun 2024 di Indonesia serta bagaimana kepemimpinan Islam dapat mengantisipasi dan merespons tantangan politik tersebut.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka dengan pendekatan analisis kritis. Pendekatan pustaka merupakan proses riset yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku referensi, studi terdahulu yang relevan, artikel, catatan, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. (M. Sari 2020).

Teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta kasus-kasus terkini yang berkaitan dengan dinamika politik dan pendidikan Islam di Indonesia. Di mana berbagai dokumen digunakan untuk mencari dan menelusuri sumber-sumber tertulis yang relevan dengan

tantangan politik di Indonesia pada tahun 2024 dan membangun kepemimpinan pendidikan Islam dalam mengatasi tantangan tersebut. Analisis data dilaksanakan menggunakan metode analisis isi, yang bertujuan untuk menginterpretasikan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, studi terdahulu, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema tersebut. Data kemudian dievaluasi dengan kritisitas terhadap realitas yang ada.

## Hasil

### 1. Tantangan Politik di Indonesia Tahun 2024

*Pertama*, polarisasi politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polarisasi mengacu pada pembagian dua kelompok orang yang memiliki kepentingan yang bertentangan dan sebagainya. Dalam konteks politik, polarisasi politik mencakup dua kelompok yang memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda terkait dengan hal-hal politis (Rizal Fathurrohman and Wahid Tuftazani Rizqi 2021).

Jadi Polarisasi politik merupakan fenomena di mana opini dan preferensi politik dalam suatu masyarakat menjadi semakin terpecah atau terpolarisasi secara signifikan antara dua atau lebih kelompok yang memiliki pandangan yang bertentangan, seringkali sejalan dengan garis-garis partai politik atau ideologi. Dampaknya dapat mencakup timbulnya ketegangan, konflik, dan perpecahan dalam masyarakat, serta memunculkan perilaku politik yang lebih ekstrem dan kurang toleran terhadap pandangan yang berbeda (Kleinfeld 2023).

Fenomena polarisasi politik di Indonesia telah meningkat kembali, terutama mulai dari Pemilihan Presiden tahun 2014 hingga tahun 2024. Pembentukan partai politik di Indonesia merupakan hasil dari perbedaan yang logis dalam ideologi, representasi, dan pengalaman politik (Zulkarnain, Katimin, and Harahap 2023).

Di Indonesia, polarisasi politik terutama terjadi antara kelompok pluralis dan Islamis. Dampak dari polarisasi politik ini dapat mencakup peningkatan konflik sosial, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan hambatan dalam proses pembangunan. Masalah yang menjadi akar dari polarisasi politik di Indonesia adalah perpecahan politik, yang berpotensi merusak demokrasi melalui pembusukan institusi-institusi demokrasi (Karim 2019).

Polarisasi politik dan perpecahan politik pada dasarnya merupakan bagian dari sistem demokrasi, terutama dalam negara yang menganut sistem multipartai. Pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia menjadi titik fokus bagi masyarakat yang khawatir akan meningkatnya polarisasi politik. Hal ini menyebabkan banyak pemilih muda enggan memberikan suaranya kepada kandidat yang berpotensi meningkatkan polarisasi politik (Mansyur 2023).

Herwyn JH Malonda, seorang anggota Komisi Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), menguraikan faktor-faktor yang dapat memicu polarisasi dalam masyarakat selama proses Pemilihan Umum 2024. Dalam penelitiannya, ia mengidentifikasi tiga faktor utama yang dapat menjadi penyebab polarisasi, yaitu media sosial, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik identitas. Menurut Herwyn, media sosial memiliki potensi untuk memperkuat perpecahan di antara berbagai kelompok politik. Dia menekankan bahwa komentar-komentar yang bersifat provokatif atau polarisasi yang tersebar luas di media sosial dapat mengakibatkan reaksi yang lebih emosional dan memperdalam kesenjangan antar kelompok (Herwyn 2023).

Aparatur Sipil Negara/ASN tidak netral, Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tercatat bahwa sebanyak 450 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran netralitas dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 240 ASN telah terbukti melakukan pelanggaran dan telah dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, 180 ASN telah mendapat tindak lanjut dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang juga menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan (Muhamad 2023).

Selain itu, Herwyn menegaskan bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan selama penyelenggaraan pemilu. Namun, gangguan terhadap netralitas ASN dapat berdampak serius terhadap peningkatan polarisasi politik. Hal ini dapat terjadi melalui pembagian internal, penyalahgunaan sumber daya publik, ketidakmerataan pelayanan publik, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, penurunan kepercayaan masyarakat, serta politisasi birokrasi (Herwyn 2023).

Terakhir, Herwyn menyoroti kontribusi politik identitas dalam meningkatkan tingkat polarisasi politik. Menurutnya, politik identitas dapat memainkan peran signifikan dalam memperdalam jurang antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Beberapa mekanisme melalui mana politik identitas dapat meningkatkan polarisasi mencakup pembingkaihan perbedaan antar kelompok, solidaritas internal kelompok, polarisasi dalam retorika politik, penggunaan media sosial untuk memperkuat identitas kelompok, konflik nilai, dan ketidaksetujuan fundamental (Herwyn 2023).

*Kedua*, berita hoaks dan ujaran Kebencian. Pada Pemilu 2024, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan dua masalah serius yang mempengaruhi proses pemilihan. Hoaks, atau informasi palsu yang disebar dengan tujuan menyesatkan atau memanipulasi opini publik, dapat mengganggu integritas dan validitas proses pemilihan (Delmana 2023).

Di sisi lain, ujaran kebencian, yang sering kali ditujukan kepada kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, atau kepercayaan politik, dapat memicu konflik sosial dan

mempengaruhi keamanan selama periode pemilu (Cervone, Augoustinos, and Maass 2021). Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial seringkali menjadi perhatian utama, karena platform ini memungkinkan informasi yang tidak diverifikasi atau tidak akurat menyebar dengan cepat dan luas. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat dan partai politik, serta merusak integritas proses demokratis (Media 2024).

Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diharapkan untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mengidentifikasi, memantau, dan menindak tindakan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, peran masyarakat sipil, media massa, dan lembaga pemantau independen juga sangat penting dalam memerangi masalah ini (Khoirunisa 2023).

Pentingnya penanganan serius terhadap hoaks dan ujaran kebencian dalam konteks pemilu telah diakui oleh banyak negara dan organisasi internasional. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan keamanan proses pemilihan serta memastikan bahwa masyarakat dapat membuat keputusan yang cerdas dan informasi yang akurat.

Beberapa kasus berita hoaks yang tersebar dipemilu 2024 seperti pada saat menjelang Pemilihan Presiden 2024, beredar beberapa berita yang ternyata merupakan hoaks yang mengganggu kestabilan proses demokratis. Salah satunya adalah berita yang mengklaim PDIP secara resmi menunjuk Ahok sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hoaks ini memicu kehebohan di masyarakat, namun kemudian dibantah oleh pihak PDIP. Selain itu, berita lain menyebutkan bahwa Muhammadiyah mengukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata berita tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan dianggap sebagai hoaks (Khoirunisa 2023).

Ada juga berita palsu yang mengatakan bahwa ada perubahan format debat antara calon presiden dan wakil presiden. Berita ini membuat orang bingung dan berpikir bahwa proses pemilu tidak jujur. Berita lain mengatakan bahwa ada kartu identitas penduduk yang diduga dari warga China digunakan untuk memilih dalam pemilu. Tetapi, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata klaim tersebut tidak benar dan hanya berusaha memengaruhi pikiran masyarakat. Terakhir, ada juga berita palsu yang mengatakan bahwa ada video yang menunjukkan uang suap dari kelompok komunis untuk melakukan kecurangan dalam pemilu. Tetapi, setelah diteliti lebih lanjut, klaim tersebut tidak terbukti (Adminkesbangpol 2023).

Sedangkan beberapa contoh kasus berita ujaran kebencian dipemilu 2024 ditujukan kepada kelompok minoritas selama periode kampanye Pemilihan Umum 2024 di Indonesia. Ujaran kebencian tersebut mengarah kepada sembilan kelompok minoritas yang meliputi Kristen Katolik, Tionghoa, dan penyandang disabilitas. Fenomena ini

menunjukkan eskalasi retorika negatif yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tersebut dalam konteks politik (Cahyadi 2023).

Ujaran kebencian merambah ke media sosial, yang menjadi platform utama bagi penyebaran pesan-pesan negatif dan provokatif. Contoh-contoh berupa video yang menghasut serta menargetkan kandidat politik dan pendukungnya menjadi salah satu bentuk ujaran kebencian yang tersebar luas di media sosial (Arianti 2023).

Selain itu, ditemukan juga fenomena ujaran kebencian di platform media sosial khususnya TikTok. Penelitian menyoroti pentingnya peningkatan sistem moderasi konten TikTok guna membatasi penyebaran propaganda dan pesan-pesan yang merugikan. Upaya kolaborasi dengan para ahli, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi lokal dianggap krusial dalam memperoleh wawasan yang lebih mendalam serta efektif dalam menghadapi tantangan ujaran kebencian dan disinformasi di platform tersebut (Frank 2023).

## Pembahasan

Setiap zaman mengalami perkembangan budaya yang berdampak pada kepemimpinan dalam Islam. Bahkan, modernisasi teknologi dan dinamika politik yang berubah setiap tahunnya membawa perubahan besar yang signifikan. Hal tersebut memiliki efek positif dan negatif. Di satu sisi, itu menghadirkan kemajuan, sementara di sisi lain, membawa tantangan baru bagi pemimpin dalam kepemimpinannya (Hifza et al. 2020).

Kepemimpinan seringkali dianggap sebagai solusi untuk sebagian besar tantangan yang dihadapi oleh berbagai organisasi (Nurwahyuliningsih, Akhmad Nulhaqim, and A. Rachim 2022). Contohnya, dalam konteks lembaga pendidikan seperti sekolah, kinerja yang optimal biasanya tercapai ketika kepala sekolah memegang peranan kepemimpinan yang kokoh. Kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi karena dapat memengaruhi berbagai aspek penting dalam organisasi tersebut (Siahaan 2018).

Terry memberikan definisi tentang kepemimpinan sebagai dinamika interaksi di mana individu, atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sukarela dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara menurut Timple, kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh sosial di mana manajer berupaya untuk mendorong partisipasi sukarela dari bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Peran pemimpin dalam mengarahkan juga mencerminkan visi dan misi yang ingin dicapai oleh organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki dampak yang penting terhadap citra suatu organisasi. (Siahaan 2018). Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk membentuk moralitas yang baik, kecerdasan berpikir, dan perkembangan menyeluruh peserta didik sehingga mereka



dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam lingkungan alam dan sosial. (Febriyanti 2021).

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu bentuk pendidikan yang menyeluruh bagi manusia, yang melibatkan pengasahan hati dan pikirannya, pembentukan aspek jasmani dan rohaninya, serta pembimbingan dalam akhlak dan keterampilannya (Fitriana 2020). Hal ini menyebabkan pendidikan Islam memberikan latihan kepada individu untuk hidup dalam kedamaian, mengatasi konflik, dan menghadapi berbagai aspek baik dan buruk dalam masyarakat.

Zakiah Drajat berpendapat bahwa pendidikan Islam mencakup gabungan antara pembelajaran tentang kepercayaan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan ini, pendidikan Islam juga mempertimbangkan aspek individual dan sosial karena ajarannya memuat pengajaran mengenai perilaku serta partisipasi dalam usaha bersama masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, baik secara personal maupun bersama-sama (Iqbal, Abul, and Sulalah 2023).

Jadi dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan dalam pendidikan Islam adalah proses pengaruh terhadap kegiatan kelompok yang terorganisir, dengan tujuan membentuk manusia menjadi individu yang sempurna, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits, dan harus tetap berpegang teguh pada keduanya. Untuk mencapai kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Upaya menyikapi tantangan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, menuntut adanya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan pendidikan Islam yang efektif menjadi krusial dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang memengaruhi arah dan kualitas pendidikan agama. Pemimpin yang efektif dalam pendidikan Islam harus mampu memahami dan menanggapi beragam tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan, serta memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap kelompoknya, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi (Cahyono 2022).

Salah satu aspek penting dari kepemimpinan pendidikan Islam yang efektif adalah kemampuan untuk menjadi responsif terhadap isu-isu yang muncul di lembaga pendidikan. Hal ini mencakup kemampuan pemimpin untuk merespons kebutuhan dan perubahan dalam pendidikan Islam, serta untuk memfokuskan perhatian pada pengembangan kualitas pendidikan tersebut. Kepemimpinan yang peka terhadap kebutuhan lembaga pendidikan Islam juga harus mampu mengelola sistem dan prosedur dengan baik, serta terlibat dalam proses kajian dan evaluasi terkait dengan peningkatan mutu pendidikan agama (Iqbal, Abul, and Sulalah 2023).



Selain itu, kepemimpinan pendidikan Islam yang efektif juga melibatkan upaya konkret dalam meningkatkan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan agama. Ini mencakup upaya untuk membangun kolaborasi yang kuat antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah, serta memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam (Purwanto 2022).

Dalam menanggapi tantangan politik di Indonesia pada tahun 2024, kepemimpinan pendidikan Islam yang berkualitas perlu memfokuskan pada kepemimpinan yang efektif untuk mengatasi kompleksitas dinamika politik dan sosial. Selain itu, penting bagi mereka untuk tetap berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kepemimpinan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan politik di tahun 2024

Petama, menguatkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Langkah ini dapat membantu menyikapi tantangan politik di Indonesia tahun 2024 dengan cara mengurangi polarisasi dan konflik yang seringkali muncul akibat perbedaan keyakinan dan pandangan politik. Dengan memperkuat nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran, pemimpin pendidikan Islam dapat mempromosikan pesan perdamaian, toleransi, dan dialog antarumat beragama.

Moderat dalam bahasa Arab berasal dari kata "*wasath*" yang memiliki arti tengah. Selain itu moderat dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah *wasathiyah*. Istilah "moderat" memiliki dua makna yang penting. Pertama, menghindari ekstremisme dalam perilaku dan ekspresi. Kedua, cenderung menuju arah tengah. Konsep ini menekankan pandangan yang seimbang dan tidak ekstrem, serta selalu berusaha mencapai keseimbangan (Dianti 2017). Menurut Muchlis M. Hanafi, moderat (*al-wasath*) adalah pendekatan yang mencakup pikiran, interaksi, dan perilaku yang seimbang dalam menghadapi situasi, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat. Hal ini melibatkan menjaga keseimbangan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan perilaku moral. (Prasetiawati 2017).

Dalam terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi merupakan memberikan kebebasan kepada individu atau komunitas untuk mengamalkan keyakinan atau mengatur kehidupan mereka sendiri, asalkan tindakan mereka tidak melanggar syarat-syarat yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Latifah, Dewi, and Furnamasari 2022). Namun, menurut WJS Poerwadarminto dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap yang menunjukkan penghargaan dan memungkinkan adanya perbedaan pendapat, pandangan, kepercayaan, atau hal lainnya yang berbeda dengan pendapat sendiri. (Samsudin, Nasor, and Masykur 2023).

Nilai moderat dan toleransi dalam konteks menyikapi politik di Indonesia merujuk pada sikap, prinsip, dan perilaku yang menekankan tengah, keseimbangan, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, dan keberagaman dalam masyarakat. Nilai moderat menekankan pada sikap yang tidak ekstrem, yang cenderung menuju jalan tengah, serta menghindari sikap yang radikal atau ekstremis. Sedangkan nilai toleransi menekankan pada penghargaan dan penerimaan terhadap perbedaan, serta kemampuan untuk hidup bersama secara damai dan harmonis meskipun memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda.

Dalam konteks politik di Indonesia, nilai moderat dan toleransi menjadi penting untuk mengatasi konflik dan polarisasi yang mungkin timbul akibat perbedaan ideologi, agama, suku, dan budaya. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, masyarakat dan pemimpin politik di Indonesia dapat menciptakan lingkungan politik yang inklusif, menghargai pluralitas, dan memperkuat kerjasama lintas kelompok dalam mencapai tujuan bersama untuk kemajuan dan keadilan sosial (Mukhibat, Nurhidayati Istiqomah, and Hidayah 2023).

Nilai moderat dan toleransi juga membentuk dasar yang kuat untuk pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Di dalam demokrasi ini, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dengan bebas dan aman, serta merasa dihargai dan diakui dalam keragaman ideologi politik dan keyakinan agama. Oleh karena itu, nilai moderat dan toleransi tidak hanya penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia yang pluralis, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas politik dan kemajuan demokrasi di negara ini.

*Kedua*, menanamkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital kepada generasi muda merupakan upaya yang sangat relevan dalam konteks kepemimpinan pendidikan Islam, terutama dalam menyikapi tantangan politik di tahun 2024. Arus informasi dan disinformasi yang melalui media sosial dan internet memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik dan dinamika politik pada masa kini. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membekali generasi muda dengan kemampuan-kemampuan tersebut.

Pentingnya menanamkan berfikir kritis dan literasi digital kepada generasi muda karena dalam pemilu di Indonesia tahun 2024 mayoritas pemilih yang termasuk daftar pemilih tetap banyak dari kalangan generasi muda. Hal tersebut disampaikan oleh August Mellaz, dalam Webinar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Forum Osis Nasional (FON). Dalam webinar bertema "Memilih Pemimpin Ideal Untuk Masa Depan Bangsa, Hak Pilihku Harus Digunakan Sebaik-baiknya", Mellaz menyampaikan bahwa pada Pemilu 2024, sebanyak 55% pemilih berasal dari Generasi Z dan Milenial. Dia menekankan pentingnya generasi muda untuk tidak hanya memahami visi, misi, dan program yang

ditawarkan oleh peserta pemilu, tetapi juga untuk membantu KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2024 (Ri 2023).

Generasi muda merupakan kelompok yang penting untuk dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis, yang memungkinkan mereka untuk secara sistematis menafsirkan informasi yang diterima dengan kritis, memahami argumen dari berbagai sudut pandang yang berbeda, mengidentifikasi bias, dan membuat keputusan yang rasional. Melalui penerapan kemampuan berpikir kritis, generasi muda dapat menghindari jebakan propaganda politik, melakukan penyaringan informasi yang tidak valid, serta mengambil keputusan politik yang lebih terinformasi dan cerdas (Novianti 2020).

Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam konteks politik, literasi digital memungkinkan generasi muda untuk memahami berbagai platform media sosial, mengevaluasi kebenaran informasi yang ditemukan secara online, serta menghindari penyebaran hoaks atau disinformasi. Selain itu, literasi digital juga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi dan debat politik yang terjadi di ruang daring (Y. Sari and Prasetya 2022).

Dengan adanya peningkatan penetrasi internet dan penggunaan media sosial di kalangan generasi muda, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital menjadi semakin penting dalam menyikapi politik di Indonesia tahun 2024. Generasi muda yang dilengkapi dengan kedua kemampuan tersebut akan menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam memahami, mengkritisi, dan berpartisipasi dalam proses politik, serta membentuk pandangan politik yang matang dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat.

*Ketiga*, membangun dialog dan Kerjasama. Upaya dalam menyikapi politik di Indonesia tahun 2024 dalam bidang kepemimpinan Pendidikan Islam dapat ditempuh dengan cara membangun dialog dan Kerjasama baik dari pemerintah, masyarakat maupun media yang ada. Langkah-langkah tersebut dapat membantu pemimpin pendidikan Islam untuk menjawab tantangan politik yang ada dengan cara yang konstruktif dan adaptif, serta memperkuat peran mereka dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan progresif.

Pentingnya membangun dialog dan kerjasama di Indonesia dalam menyikapi tantangan politik di Indonesia tahun 2024 disebabkan oleh kekayaan budaya yang dimiliki negara ini, yang terbentuk dari keadaan geografisnya yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Keanekaragaman budaya Indonesia mencakup berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Dalam konteks ini, kepemimpinan pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting (Krismiyanto and Kii 2023).

Pemimpin pendidikan Islam perlu memastikan bahwa pendidikan yang mereka tawarkan mencakup nilai-nilai yang bisa membuka dialog baik sesama penganut agama maupun sesama warga negara Indonesia, penghargaan terhadap keberagaman, dan pembangunan kerjasama yang saling menguntungkan di antara masyarakat yang berbeda agama. Melalui pendidikan yang holistik dan inklusif, pemimpin pendidikan Islam dapat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan negara.

## Simpulan

Kepemimpinan pendidikan Islam merupakan proses pengaruh terhadap aktivitas kelompok yang terstruktur, dengan tujuan membentuk individu menjadi sosok yang utuh, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam konteks pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan perlu dipegang teguh. Untuk mencapai kepemimpinan yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, hal ini menjadi penting.

Tantangan politik di Indonesia tahun 2024 dalam kepemimpinan Pendidikan Islam yaitu, polarisasi politik, berita hoaks dan ujaran kebencian. Dengan memahami kompleksitas dinamika politik dan sosial, pemimpin pendidikan Islam perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan positif. Ini termasuk menguatkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran, menanamkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital kepada generasi muda, serta membangun dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang inklusif, harmonis, dan progresif di tengah tantangan politik yang cepat berubah.

Saran untuk penelitian selanjutnya selanjutnya agar memfokuskan pada implementasi prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits dalam kepemimpinan pendidikan Islam serta strategi konkret untuk mengatasi tantangan politik seperti polarisasi politik dan berita hoaks. Studi kasus di lembaga pendidikan Islam dapat memberikan wawasan mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut.

## Referensi

- Adminkesbangpol. 2023. "Bahaya Hoaks Pemilu Bagi Masyarakat." 2023. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/915/bahaya-hoaks-pemilu-bagi-masyarakat>.
- Akip, Muhammad, and Rahmat Azwar. 2022. "Pendidikan Islam Sebagai Subsystem Pendidikan Nasional." *Studi Keislaman* 20 (Maret): 87–97.

- Arianti, Rosy Dewi. 2023. "Kelompok Minoritas Jadi Sasaran Ujaran Kebencian Selama Pemilu 2024." 2023. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/17/133125082/kelompok-minoritas-jadi-sasaran-ujaran-kebencian-selama-pemilu-2024?page=all>.
- Barokah, Fitria, Tabah Maryanah, Ari Darmastuti, and Hertanto Hertanto. 2022. "Disrupsi Politik Peluang Dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024 Political Disruption: Opportunities and Challenges of New Political Parties Ahead of the 2024 Election." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21 (1): 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.
- Cahyadi, Yogi A. 2023. "Kampanye Pemilu 2024, Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Minoritas Meningkatkan." 2023. <https://aji.or.id/informasi/kampanye-pemilu-2024-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-minoritas-meningkat>.
- Cahyono, E. T. (2022). Kepemimpinan Efektif Bagi Generasi Milenial. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 641-651.
- Cervone, Carmen, Martha Augoustinos, and Anne Maass. 2021. "The Language of Derogation and Hate: Functions, Consequences, and Reappropriation." *Journal of Language and Social Psychology* 40 (1): 80–101. <https://doi.org/10.1177/0261927X20967394>.
- Delmana, Lati Praja. 2023. "Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4 (2): 188–211. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/825>.
- Dianti, Yira. 2017. "Konsep Moderat Dalam Keluarga Muslim Perspektif Ahlussunnah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Dinarti, Novi Suci, Shalwa Rizkya Salsabila, and Yusuf Tri Herlambang. 2024. "Dilema Etika Dan Moral Dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi Terhadap Privasi Keamanan, Dan Kejahatan Siber." *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (1): 8–16. <https://doi.org/10.26418/jdn.v2i1.74931>.
- Febriyanti, Natasya. 2021. "Implementasi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (1): 1631–38. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1151/1031>.
- Fitriana, Dian. 2020. "Hakikat Dasar Pendidikan Islam." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 7 (2): 143–50. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v7i2.1322>.
- Frank. 2023. "Jelang Pemilu 2024: Waspada Peran TikTok Dalam Penyebaran Ujaran Kebencian Dan Hoaks." 2023. <https://theconversation.com/jelang-pemilu-2024-waspada-peran-tiktok-dalam-penyebaran-ujaran-kebencian-dan-hoaks-203422>.
- Hidayat, Rahmat. 2023. "Mengenal Pendidikan Islam Dan Politik Pendidikan Di Indonesia." *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan (AJPP)* 2 (2): 117–24. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>.

- Hifza, Hifza, Muhamad Suhardi, Aslan Aslan, and Silvia Ekasari. 2020. "Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Interdisipliner." *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5 (1): 46–61. <https://doi.org/10.31538/ndh.v5i1.518>.
- Iqbal, Moh, Fachrullah Abul, and Jihad Sulalah. 2023. "Model Kepemimpinan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas" 08: 505–21.
- Jhuji, Et.al. 2020. "Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam." *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara* 1 (2): 113.
- Karim, Abdul Gaffar. 2019. "Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan Di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10 (2): 215. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>.
- Khaldun, Mufid, Nurmawati, Ribut, Sufiyani, and Suherman. 2023. "Esensi Dan Urgensi Emosional Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam ( Sebuah Analisis Konseptual ) Emotional Essence and Urgency in Islamic Educational Leadership ( A Conceptual Analysis )." *Jurnal Ilmiah Pascasarjana* Vol.3, No.
- Khoirunisa, Julia Rizky. 2023. "Kumpulan Hoaks Seputar Pilpres 2024, Berikut Faktanya." 2023. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5397355/kumpulan-hoaks-seputar-pilpres-2024-berikut-faktanya?page=2>.
- Kleinfeld, Rachel. 2023. "Polarization, Democracy, and Political Violence in the United States: What the Research Says." *Carnegie Endowment for International Peace*, no. September. <https://carnegieendowment.org/2023/09/05/polarization-democracy-and-political-violence-in-united-states-what-research-says-pub-90457>.
- Krismiyanto, Alfonsus, and Rosalia Ina Kii. 2023. "Membangun Harmoni Dan Dialog Antar Agama Dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6 (3): 238–44. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/18822>.
- Latifah, Alifa Nur, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. 2022. "Pentingnya Menumbuhkan Sikap Toleransi Pada Anak Usia Sekolah Di Indonesia: Negeri Multikultural." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (1): 969–73. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2348>.
- Maghfiroh, Nailil, Atik Dwi Lestari, and Pascasarjana IAIN Salatiga Korespondensi. 2022. "Politik Pendidikan Islam Di Indonesia." *Citra Ilmu, Edisi* 35: 2022.
- Mansyur, Ibnu Chaerul. 2023. "Polarisasi Politik Di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka." *Jurnal Politik Profetik* 11 (1): 1–22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>.
- Mauludah, Anis Zulfiah, Toha Ma'sum, and Juni Iswanto. 2023. "Konsep Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (11): 9495–9501. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.2594>.
- Media, Literasi. 2024. "Mencegah Hoaks Di Kampanye Pemilu 2024." *Politik*, 137–56.



- Melalusa Susthira. 2023. "Lemhannas: Tiga Tantangan Eskalasi Politik Indonesia 2023-2024." 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3317806/lemhannas-tiga-tantangan-eskalasi-politik-indonesia-2023-2024>.
- Mu'minah, Mu'minah, Namiroh Namiroh, and Lola Malihah. 2023. "Peran Kepemimpinan Dalam Lembaga Pendidikan Agama Islam." *Tarbiyah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Keagamaan* 7 (02): 75. <https://doi.org/10.58791/tadrs.v7i02.358>.
- Muhamad, Nabilah. 2023. "Ratusan ASN Tak Netral Pada Pemilu 2024, Ini Jabatannya." *Katadata Media Network*. 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/26/ratusan-asn-tak-netral-pada-pemilu-2024-ini-jabatannya>.
- Mukhibat, M, Ainul Nurhidayati Istiqomah, and Nurul Hidayah. 2023. "Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan)." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4 (1): 73–88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>.
- Novianti, Williya. 2020. "Urgensi Berpikir Kritis Pada Remaja Di Era 4.0." *Journal of Education and Counseling (JECO)* 1 (1): 38–52. <https://doi.org/10.32627/jeco.v1i1.519>.
- Nurwahyuliningsih, Eka, Soni Akhmad Nulhaqim, and Hadiyanto A. Rachim. 2022. "Kepemimpinan Dan Pengambilan Keputusan Pada Organisasi Layanan Manusia." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 13 (Vol. 13 No. 2, Juni 2022): 136–45. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5310>.
- Prasetiawati, Eka. 2017. "Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme Di Indonesia." *Fikri* 2 (2): 523–66.
- Purwanto, A. 2022. "Meningkatkan Kepemimpinan Efektif Dan Manajemen Mutu Pendidikan Dalam Menghadapi Tantangan Global." *Journal of Information Systems and Management* 2 (1): 1–7. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4152231](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4152231).
- Ri, humas kpu. 2023. "55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024." 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024>.
- Rizal Fathurrohman, and Wahid Tuftazani Rizqi. 2021. "Reorientasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Pandemi Covid-19." *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education* 1 (2): 107–19. <https://doi.org/10.14421/hjie.2021.12-09>.
- Samsudin, Syafri, M. Nesor, and Ruban Masykur. 2023. "Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (5): 3647–57. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2005>.
- Sari, Milya. 2020. "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," 41–53.



- Sari, Yunita, and Dan Hendri Prasetya. 2022. "Literasi Media Digital Pada Remaja, Ditengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial." *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 8 (1): 12–25.
- Siahaan, Amiruddin. 2018. *Kepemimpinan Pendidikan (Aplikasi Kepemimpinan Efektif, Strategis, Dan Berkelanjutan)*. CV. Widya Puspita. Medan: CV. Widya Puspita.
- Zahra Hana Fadhilah, Hudaidah. 2021. "Paradigma Baru Pendidikan Islam Konteporer Di Indonesia." *Pendidikan Agama Islam* 4: 6.
- Zulkarnain, Zulkarnain, Katimin Katimin, and Elly Harahap Warnisah Harahap. 2023. "Polarisasi Dan Sukses Kekuasaan Politik Indonesia Dalam Wacana Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7 (3): 726. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.726-735>.
- Zulkifli, Zulkifli. 2018. "Regulasi Pendidikan Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14 (02): 63–74. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.904>.